

DPR Minta Pemerintah Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar



Realitarakyat.com – Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dijadwalkan akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta 24 April mendatang. Pemerintah RI diminta menolak kedatangan otak kudeta militer Myanmar itu.

Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menilai semestinya pemerintah RI tidak menerima kedatangan pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN.

“Pemerintah Republik Indonesia tidak boleh memberikan pengakuan terhadap junta militer sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar, karena rezim ini telah membantai warga sipil dan membungkam gerakan demokrasi yang merupakan suara rakyat Myanmar,” kata Irine dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/4/2021).

Menurut Irine, jika Min Aung Hlaing diundang ke KTT ASEAN, maka sepatutnya mengundang pula pemerintahan tandingan yang didukung rakyat Myanmar, yakni National Unity Government (NUG). Pemerintahan sipil ini dinilai mencerminkan demokrasi.

Demonstrasi di Myanmar masih terus berlangsung, hingga kini sudah lebih dari 700 warga sipil tewas akibat kekerasan aparat keamanan Myanmar yang menggunakan senjata api untuk membubarkan warga sipil.

“Myanmar sudah di ambang perang saudara, dan kita tahu bahwa NUG dan rakyat Myanmar tidak akan mundur karena mereka sudah sekian lama ditindas rezim militer. Jadi ASEAN perlu menekan rezim militer untuk mengembalikan mandatnya kepada pemerintahan sipil, seperti sebelum kudeta, karena itu satu-satunya jalan,” ujar Irine.

UN High Commissioner for Human Rights mengingatkan sewaktu-waktu bisa terjadi konflik terbuka antara warga sipil dan militer di Myanmar. Komisi PBB itu juga memperingatkan bahwa situasi di Myanmar berpotensi mengulang konflik di Suriah pada 2011, saat aksi damai dihadapi dengan kekerasan pasukan keamanan.

Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya diagendakan akan menghadiri pertemuan khusus para pemimpin negara-negara ASEAN di Jakarta. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan pengumuman resmi terkait kehadiran Jenderal Min akan diumumkan oleh Brunei Darussalam.

“Mengenai hal kehadiran pemimpin ASEAN dan lain-lain, Brunei sebagai Ketua ASEAN saat ini yang akan mengumumkan,” kata juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, saat

dihubungi, Minggu (18/4).

Dia menjelaskan bahwa pertemuan para pemimpin negara ASEAN diselenggarakan di Indonesia karena kantor sekretariatnya berkedudukan di Jakarta.

“Jakarta tempat pertemuan karena Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta,”
ungkapnya.[prs]